



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ERWAN WAHYUDI, SP. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Kabupaten Paser

Dr. ERWAN WAHYUDI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Padi, Palawija dan Hortikultura | Persentase meningkatnya produksi padi | 1,44 |
| | | Persentase meningkatnya produksi palawija | 5,33 |
| | | Persentase meningkatnya produksi hortikultura | 2,81 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah | Nilai Evaluasi SAKIP Dan APIP | 67 |

| Program | Anggaran | Ket |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 19.956.559.639 | APBD Kab. |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 12.716.364.245 | APBD Kab. |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 109.823.486.188 | APBD Kab. Dan Bankeu Prov. |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 3.485.895.700 | APBD Kab. |
| Program Penyuluhan Pertanian | 8.319.829.905 | APBD Kab. Dan DAK Non Fisik |
| TOTAL | 154.302.135.677 | |

Tana Paser, Oktober 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Paser



Dr. ERWAN WAHYUDI, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

**PENJELASAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KETERANGAN PENJELASAN INDIKATOR |
|---|---|---|
| 1. Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura | Persentase Meningkatnya Produksi Padi | Presentase Peningkatan Produksi Padi adalah Persentase dari Jumlah Produksi Padi Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Padi Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021) Jumlah Produksi Padi di dapat dari Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan |
| | Persentase Meningkatnya Produksi Palawija | Presentase Peningkatan Produksi Palawija adalah Persentase dari Jumlah Produksi Palawija Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Palawija Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021). Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan. |
| | Persentase Meningkatnya Produksi Hortikultura | Presentase Peningkatan Produksi Hortikultura adalah Persentase dari Jumlah Produksi Hortikultura Tahun Berjalan di kurangi dengan Jumlah Produksi Hortikultura Tahun Dasar (Tahun 2021) dibagi dengan Jumlah Produksi Tahun Dasar (Tahun 2021). Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Berjalan. |
| 2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel | Nilai Evaluasi SAKIP | Penilaian SAKIP sebagai indikator dalam melihat bagaimana mengetahui implemantasi atas SAKIP serta tingkat akuntabilitas kinerja. Melalui penilaian SAKIP Pemerintah dapat mengukur dan memantau kinerja organisasi secara lebih terstruktur dan obyektif. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. |